

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Melalui hasil evaluasi yang telah dilakukan mengenai hasil kinerja serta pencapaiannya, maka diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dan 2021 **sudah cukup baik** dengan adanya pencapaian target serta peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Hasil skor/peringkat yang selalu masuk kedalam tiga besar Provinsi terbaik dalam taraf nasional serta hasil pencapaian kinerja dari ketiga capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meningkat di tahun 2021 menjadi bukti dari penilaian kinerja tersebut. Penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dilihat melalui indikator dan analisisnya. Berdasarkan masing-masing capaian kinerja, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Kinerja Makro

Hasil analisis dalam capaian kinerja makro menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menunjukkan tidak terjadinya kenaikan capaian kinerja secara signifikan. Namun pada dasarnya hasil pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dapat dikatakan berhasil mencapai target dan dikategorikan “Sangat Baik”. Pada dasarnya Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kualitas hidup masyarakat yang baik, penurunan angka

kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan ekonomi, pertumbuhan pendapatan per kapita, dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat. Artinya dalam variabel ini, Provinsi Jawa Barat memiliki kinerja yang baik dan telah mencapai pembangunan nasional.

2. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Hasil evaluasi dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam IKK *outcome* menunjukkan bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dan hampir memenuhi target yang ingin tercapai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada dasarnya, hanya terdapat 10 dari 32 urusan pemerintahan yang telah mencapai target. Sedangkan mayoritas urusan pemerintahan lainnya belum bisa mencapai target yang ditetapkan dan memiliki kinerja yang “Kurang”. Masih terdapat banyak urusan pemerintahan yang belum berhasil tercapai, termasuk dengan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Hal tersebut didukung dengan belum terpenuhinya kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum, persentase kawasan kumuh yang dapat ditangani belum sepenuhnya, sedikitnya tenaga kerja yang bersertifikat, sedikitnya perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan, belum terpenuhinya target pemakaian kontrasepsi Modern Contraceptive, sedikitnya peningkatan investasi di Provinsi, dan sebagainya.

Hasil analisis dalam IKK fungsi penunjang menunjukkan kenaikan hasil capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didukung dengan capaian yang menunjukkan kenaikan rasio keuangan,

peningkatan pegawai yang berkompentensi dan berpendidikan, peningkatan penggunaan metode kompetitif dalam pelaksanaan pengadaan, serta meningkatnya transparansi/partisipasi publik dengan pelaksanaan penyebaran informasi sumber daya dan akses publik yang baik. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Jawa Barat berhasil mengatur dan menangani urusan pemerintahan internal yang dijalankan oleh seluruh bagian Pemerintah Daerah.

3. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Hasil analisis indikator kinerja utama atau disebut sebagai IKU dalam capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menunjukkan keberhasilan Jawa Barat dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, dimana hal ini ditunjukkan dalam total ketercapaian kinerja yang melebihi target realisasi pada tahun 2020 dan 2021. Ketentuan pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 dikategorikan “Sangat Baik”. Pada dasarnya, Provinsi Jawa Barat telah memenuhi sasaran strategis RPJMD dengan menghasilkan kebijakan, program, dan inovasi pelayanan publik yang baik, mencapai visi dan misi prioritas Jawa Barat, serta efisiensi dalam menggunakan sumber daya.

6.2. Rekomendasi

Hasil kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa Barat, menghasilkan

beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan baik dalam kegiatan evaluasi maupun dalam penelitian kinerja Jawa Barat, yaitu:

1. Melihat bagaimana indikator dalam masing-masing capaian kinerja memiliki level kesamaan yang berbeda atau bersifat positif negatif dan tidak dapat disamakan, maka teori pengukuran kinerja yang digunakan Pemerintah seharusnya memiliki indikator yang sederajat untuk memudahkan penilaian kinerja.
2. Perlu adanya dorongan kepada urusan-urusan pemerintahan dalam melakukan tugas dan wewenangnya atau dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dorongan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kinerja Jawa Barat yang belum bisa mencapai kinerja yang optimal dan dapat meningkatkan kinerja Provinsi Jawa Barat atau bahkan menjadi Provinsi terbaik dalam tingkat nasional.
3. Dengan melihat bahwa Kemendagri yang selama tiga tahun tidak mengeluarkan skor dan peringkat kinerja, maka perlu adanya alasan yang jelas dan konsistensi dalam mengeluarkan hasil evaluasi. Hal ini dikarenakan hasil dari capaian kinerja tersebut sangatlah penting bagi Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.
4. Perlu adanya tim evaluasi internal agar lebih efisien. Artinya dalam hal ini, Provinsi juga akan mengukur kinerja Provinsi tanpa harus menunggu Tim Nasional untuk melakukan evaluasi dan mengeluarkan hasil skor/peringkat dalam bentuk Keputusan Menteri. Hal ini dilakukan agar mempersingkat

waktu kegiatan evaluasi, mencegah terjadinya penundaan pengumuman hasil kinerja, serta Pemerintah Daerah dapat dengan cepat memperbaiki kinerjanya.

Selain ketiga rekomendasi tersebut, ada pula rekomendasi secara akademis agar dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang manajemen publik. Pertama, dalam penelitian evaluasi kinerja berbasis LPPD dianjurkan untuk menghitung berdasarkan kategori range dan bukan rata-rata dalam bentuk persentase. Kedua, perlu dilakukan pengukuran efektivitas kegiatan EPPD untuk menilai ketercapaian fungsi dari pelaksanaan pengukuran kinerja serta mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Buku dan Jurnal

Afiyanti, Yati. "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, no. 2 (2008): 137–141.

- Berman, Evan M. *Performance And Productivity In Public And Nonprofit Organizations. The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society*. 2nd ed., 2006.
- Budiastuti, Dyah, and Agustinus Bandur. *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Creswell, John W. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE. 4th ed. Vol. 59. SAGE Publications, 2014.
- Effendi, Taufiq. *Pengukuran Dan Analisis Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah*, 2008.
- Fitzpatrick, Jody L., James R. Sanders, and Blaine R. Worthen. P. *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*, 2011.
- Harsastro, Priyatno. “MANAJEMEN DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN Priyatno Harsasto.” *Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Semarang* (2004).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4918>.
- Heriningsih, Sucahyo. “Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor.” *Univesity Research Colloquium* (2015): 86–95.
- Indah. “Hubungan Wewenang Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” 9, no. 2 (2014): 1–16.

- Khikmah, Alayyal. "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 3, no. 1 (2014).
- Maria, Criveanu. "Organizational Performance – a Concept That Self-Seeks To Find Itself." *Analele Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu : Seria Economie* 1, no. 4 (2016): 179–183.
- Mertens, Donna M., and Amy T. Wilson. *Program Evaluation Theory and Practice. Program Evaluation Theory and Practice*. Vol. 44, 2011.
- Murti, Ridho Bayu, Mahmudi Mahmudi, and Ahada Nurfauziya. "An Analysis of Performance Measurement System Used in Indonesia Local Government." *Journal of Contemporary Accounting* 3, no. 2 (2021): 64–76.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Vol. 1, 2014.
- Scriven, Michael. "Evaluation Theory and Metatheory." *International Handbook of Educational Evaluation* (2003): 15–30.
- Suwatin. "Indikator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi: Tinjauan Terhadap Indikator Kinerja Dalam Instrumen Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah." *Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN RI* (2009): 1–12.
- Tsauri, Sofyan. *MANAJEMEN KINERJA Performance Management. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014.
- Utama, Elga Tri. "Pengaruh Implementasi Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Tasikmalaya.” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 5 (2020).

Widagdo, Ari Kuncara, and Badrul Munir. “Profil Kepala Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 2 (2017).

Artikel

Bappedda Jabar Humas. “LKPPD Jabar 2018: 20 Kabupaten/Kota Masuk Zona Hijau”. Diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 8.51. 2019.
<http://bappeda.jabarprov.go.id/lkppd-jabar-2018-20-kabupatenkota-masuk-zona-hijau/>

HUMAS JABAR, “LKPPD Jabar 2018: 20 Kabupaten/Kota Masuk Zona Hijau”. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022 Pukul 23.48. 2019.
<http://bappeda.jabarprov.go.id/lkppd-jabar-2018-20-kabupatenkota-masuk-zona-hijau/>

Reh, F. John. *Key Performance Indicators (KPI)*. Diakses pada 8 Juni 2022 Pukul 20.33. http://www.vip-qualitysoft.com/time_management/kpi/

REP-HUMAS JABAR. LPPD 2019, “Pemdaprov Jabar Bantu Kabupaten/Kota Penuhi Indikator Kinerja Kunci”. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2021 pukul 22.39. 2020.
<https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/36019/2020/01/14/LPPD-2019-Pemdaprov-Jabar-Bantu-KabupatenKota-Penuhi-Indikator-Kinerja-Kunci>